



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**TINJAUAN PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DANALAT KESEHATAN DI KEMENTERIAN
KESEHATAN RI**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Fachra Arofah Handayani
1902043006

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
JAKARTA
2022**



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF. DR. HAMKA

**TINJAUAN PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI
PERSEDIAAN PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL
KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN DI KEMENTERIAN
KESEHATAN RI**

LAPORAN TUGAS AKHIR
Fachra Arofah Handayani
1902043006

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat dalam Memperoleh Predikat Ahli
Madya (A.Md)

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
PROGRAM STUDI DIPLOMA TIGA AKUNTANSI
JAKARTA
2022**

HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR

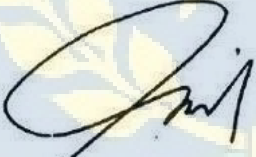
**Judul Tugas Akhir : Tinjauan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi
Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi
Persediaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal
Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian
Kesehatan RI.**


**Nama : Fachra Arofah Handayani
Nim : 1902043006
Program Studi : D3 Akuntansi
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis**

Jakarta, 15 Juli 2022

Mengetahui,
Ketua Program Studi

Dosen Pembimbing


Arif Widodo Nugroho, S.E.,
M.M


Arif Widodo Nugroho, S.E.,
M.M

LEMBAR PENGESAHAN

Laporan Tugas Akhir dengan judul:

**TINJAUAN PENERAPAN PERNYATAAN STANDAR AKUNTANSI
PEMERINTAHAN (PSAP) NOMOR 05 TENTANG AKUNTANSI PERSEDIAAN
PADA SATUAN KERJA DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT
KESEHATAN DI KEMENTERIAN RI**

Oleh:

Fachra Arofah Handayani

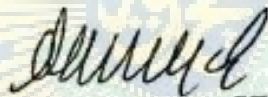
1902043006

Telah dievaluasi dan disahkan oleh Tim Evaluasi
Program Diploma Tiga Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA

Pada tanggal: 29 Juli 2022

Tim Penguji

Ketua merangkap anggota:



(Herwin Kurniawan, SE., MM.)

Anggota:

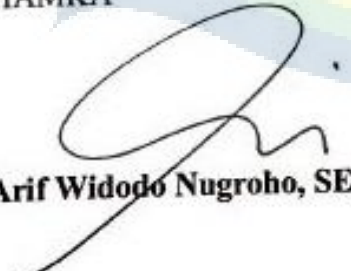


(Arif Widodo Nugroho, SE., MM.)

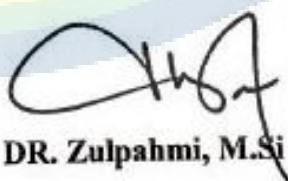
Mengetahui,

Ketua Program Studi
Diploma Tiga Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.DR.
HAMKA

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Muhammadiyah Prof.DR.
HAMKA



Arif Widodo Nugroho, SE., MM.



DR. Zulpahmi, M.Si

PERNYATAAN ORISINALITAS

Saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa Tugas Akhir dengan judul **“Tinjauan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI.”** Merupakan hasil karya saya pribadi dengan keyakinan dan pengetahuan, saya tidak mencantumkan hasil karya orang lain atau bahan-bahan yang telah dipublikasikan sebelumnya yang diajukan untuk gelar maupun ijazah pada Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA atau perguruan tinggi lainnya.

Semua sumber yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan dengan benar. Apabila dikemudian hari Tugas Akhir ini merupakan hasil plagiat atau penjiplakan terhadap hasil karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan dan bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan yang telah ditetapkan oleh Universitas Muhammadiyah Prof Dr HAMKA.

Jakarta, 15 Juli 2022

Yang Menyatakan,

The image shows a handwritten signature in black ink over a yellow official stamp. The stamp contains the text 'SEKOLAH BERKUALITAS' at the top, 'MATERAI TEMPEL' in the middle, and '74AJ81530173' at the bottom. To the left of the stamp is a vertical logo with the text 'SEKOLAH BERKUALITAS'.

Fachra Arofah Handayani

NIM. 1902043006

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Segala puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Ta'Ala yang telah melimpahkan nikmat serta hidayah. Shalawat serta salam tercurahkan kepada suri tauladan kita, Nabi Muhammad Sholallahu Alaihi Wassalam yang telah membawa umat dari zaman kegelapan hingga zaman yang terang benderang.

Berkat rahmat, nikmat, kesehatan, kesempatan dari Allah, dukungan baik secara moril, materil serta doa kedua orang tua, sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan sesuai sistematika penulisan. Laporan tugas akhir merupakan bentuk pertanggungjawaban saya secara tertulis setelah melakukan kegiatan pengamatan.

Laporan tugas akhir menjadi salah satu persyaratan yang harus dipenuhi untuk dapat menyelesaikan Program Studi Diploma III Akuntansi dalam mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA. Laporan ini berjudul **“Tinjauan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI.”**

Selama proses penyusunan laporan tugas akhir ini saya banyak mendapatkan bantuan serta dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Gunawan Suryoputro, M.Hum. selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.

2. Bapak Dr. Zulpahmi, S.E., M.Si. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
3. Bapak Sumardi, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan I Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
4. Bapak M. Nurrasyidin, S.E., M.Si. selaku Wakil Dekan II Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
5. Bapak Edi Setiawan, S.E., M.M. selaku Wakil Dekan III Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
6. Bapak Dr. Tohirin, SHI., M.Pd.I selaku Wakil Dekan IV Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA.
7. Arif Widodo Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi dan Dosen Pembimbing Fakultas Ekonomi dan Bisnis UHAMKA.
8. Seluruh staf Kementerian Kesehatan RI yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk melaksanakan kegiatan pengamatan.
9. Mama, Ayah dan Anan yang telah banyak berkorban demi keberhasilan dalam proses penyelesaian Tugas Akhir ini.
10. Uwa serta abang dan kaka yang selalu memberikan dukungan sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini dengan baik dan tepat waktu.
11. Syafira Indah Cahya selaku partner berjuang dari awal sampai akhir penyusunan.
12. Bubba Simalakama yang selalu setia mendengarkan keluh kesah dalam proses penyusunan Tugas Akhir.
13. Canva Narendra selaku tokoh fiksi yang telah memberikan dorongan serta motivasi yang berdampak baik dalam proses penyusunan Tugas Akhir ini.
14. Diri saya yang tidak menyerah dan percaya kepada diri sendiri bahwa saya bisa menyelesaikan Tugas Akhir ini dari awal hingga akhir.

15. Hesti Hernawati, Putri Elizabeth, Silvi Haningsih dan Vika Alviyani selaku sahabat yang telah menemani sekaligus memberikan dukungan dan doa sehingga saya mampu menyelesaikan Tugas Akhir ini.

Semoga laporan ini dapat menambah wawasan serta pengetahuan bagi pembaca. Dalam penyusunan laporan ini masih terdapat kekurangan atas hal tersebut saya meminta maaf, saya sangat terbuka atas saran dan kritik yang membangun.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Jakarta, 22 Juli 2022

Penulis



Fachra Arofah Handayani

NIM : 1902043006

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN PERSETUJUAN LAPORAN TUGAS AKHIR	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	vii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GAMBAR	x
DAFTAR LAMPIRAN	xi
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Permasalahan.....	4
1.2.1 Pokok Permasalahan.....	4
1.2.2 Pembahasan Permasalahan.....	4
1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	5
1.3.1 Tujuan Penulisan.....	5
1.3.2 Manfaat Penulisan.....	5
1.4 Metode Penulisan.....	6
BAB II TINJAUAN TEORETIS	
2.1 Prosedur.....	7
2.1.1 Pengertian Prosedur.....	7
2.1.2 Fungsi Prosedur.....	7
2.1.3 Tujuan Prosedur.....	8
2.2 Akuntansi.....	8
2.2.1 Pengertian Akuntansi.....	8
2.2.2 Pengertian Akuntansi Pemerintahan.....	9
2.2.3 Pengertian Standar Akuntansi Pemerintahan.....	10
2.3 Persediaan.....	11
2.3.1 Pengertian Persediaan.....	11
2.3.2 Jenis-jenis Persediaan.....	11

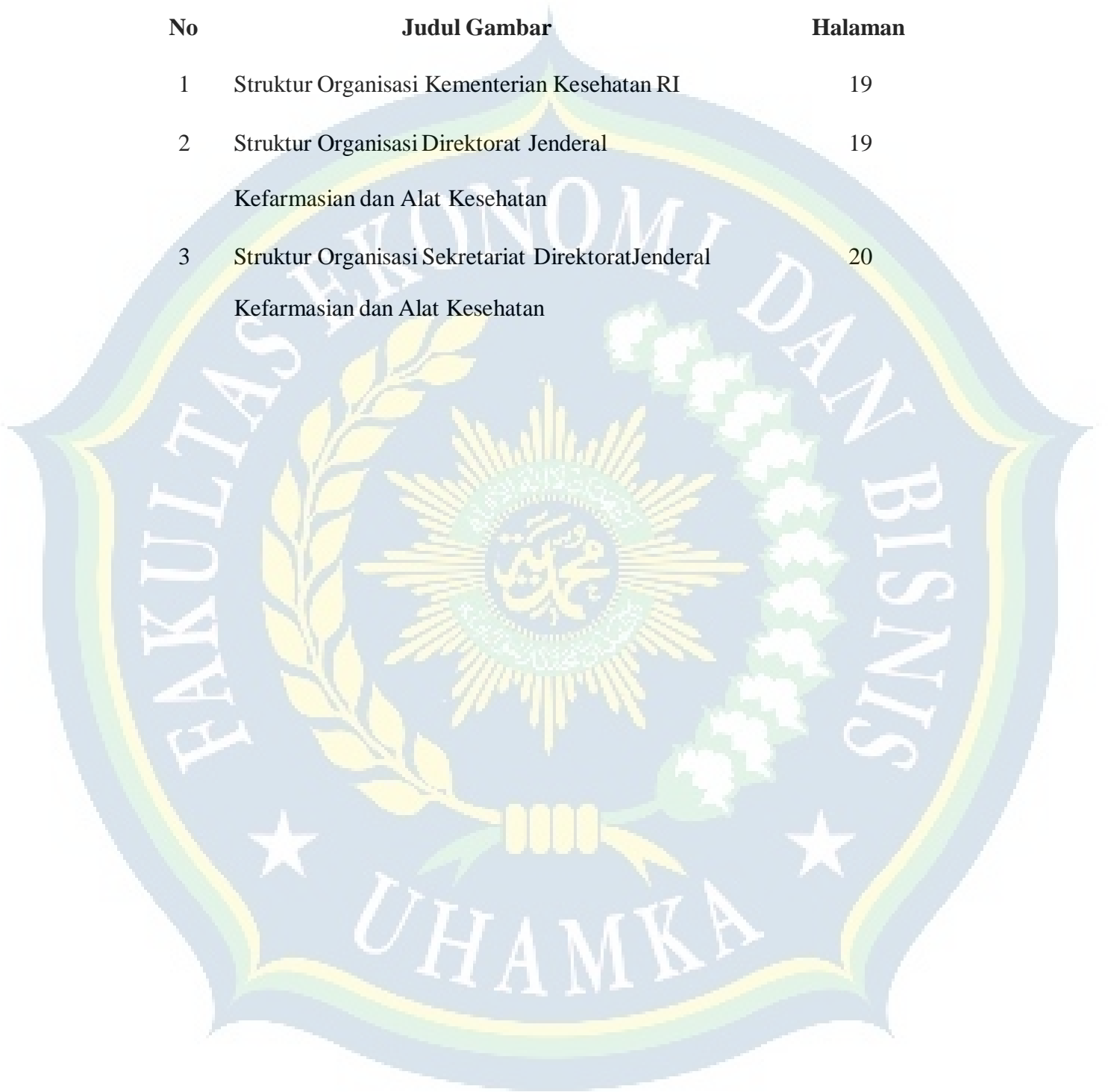
2.3.3 Metode Persediaan	13
2.3.4 Pengakuan Persediaan.....	14
2.3.5 Pengukuran Persediaan	14
2.3.6 Beban Persediaan	14
2.3.7 Pengungkapan Persediaan.....	15
BAB III HASIL DAN PEMBAHASAN	
3.1 Sejarah Instansi	16
3.1.1 Sejarah Kementerian Kesehatan RI.....	16
3.1.2 Visi dan Misi Kementerian Kesehatan RI.....	16
3.1.3 Nilai Kementerian Kesehatan RI	17
3.1.4 Budaya Kementerian Kesehatan RI	18
3.1.5 Tujuan Strategis Kementerian Kesehatan RI	19
3.1.6 Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan RI	20
3.2 Pembahasan	22
3.2.1 Prosedur Pengelolaan Barang Persediaan pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	22
3.2.2 Klasifikasi, Pengakuan, Pengukuran, Beban dan Pengungkapan dalam Penerapan Akuntansi Persediaan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia	23
3.2.3 Petunjuk Teknis Penggunaan Menu Transaksi Aplikasi Persediaan dan Simak BMN	
BAB IV PENUTUP	
4.1 Kesimpulan.....	31
4.2 Saran.....	31
DAFTAR PUSTAKA	33
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

No	Judul	Halaman
1	Daftar Rincian Persediaan Barang Pakai Habis Berupa Barang Konsumsi	25
2	Rincian Nilai Barang Konsumsi Per Satker TA 2021	26
3	Daftar Rincian Persediaan Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	27
4	Rincian Nilai Peralatan dan Mesin untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	27
5	Daftar Rincian Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	28
6	Rincian Nilai Barang Persediaan Lainnya untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat	28
7	Daftar Rincian Nilai Persediaan Tahun 2021	28

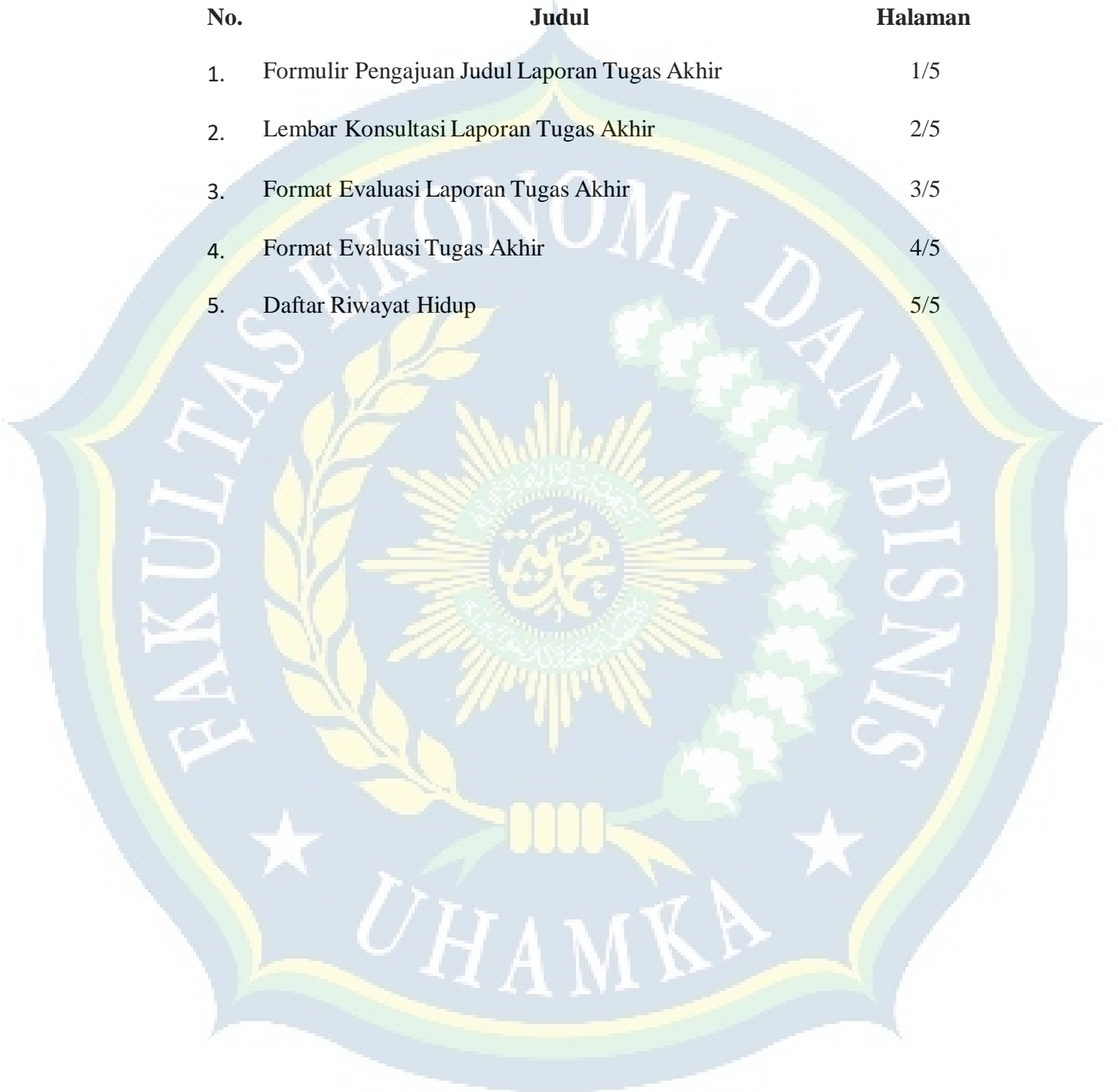
DAFTAR GAMBAR

No	Judul Gambar	Halaman
1	Struktur Organisasi Kementerian Kesehatan RI	19
2	Struktur Organisasi Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	19
3	Struktur Organisasi Sekretariat DirektoratJenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan	20



DAFTAR LAMPIRAN

No.	Judul	Halaman
1.	Formulir Pengajuan Judul Laporan Tugas Akhir	1/5
2.	Lembar Konsultasi Laporan Tugas Akhir	2/5
3.	Format Evaluasi Laporan Tugas Akhir	3/5
4.	Format Evaluasi Tugas Akhir	4/5
5.	Daftar Riwayat Hidup	5/5



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era globalisasi ini, sebagai anggota masyarakat dunia, Indonesia berkewajiban untuk melanjutkan upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik melalui terwujudnya transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi dalam pengelolaan keuangan. Saat ini, Indonesia memerlukan reformasi di bidang keuangan. Sepanjang proses akuntansi, kita dapat membuat informasi keuangan untuk keperluan berbagai pihak. Perubahan akuntansi perlu dilandasi dengan landasan yang kokoh yakni Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang bertujuan untuk menyampaikan panduan pada penyusunan serta penyajian laporan keuangan pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah.

SAP berbasis akrual berlaku di lingkungan pemerintahan yaitu di lingkungan pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan unit organisasi lingkungan pemerintah pusat/daerah, dimana unit organisasi tersebut diwajibkan oleh peraturan perundang-undangan untuk menyampaikan laporan keuangan (Peraturan Pemerintah RI No.71 Tahun 2010). Pembuatan SAP berbasis akrual dilakukan oleh Komite Standar Akuntansi Pemerintahan (KSAP) dengan menggunakan proses pembuatan standar. Pengenalan SAP telah disertai dengan keinginan pembuat standar pemerintah dan lembaga untuk menerapkan pengukuran kinerja dalam administrasi publik (Arnaboldi *et al.*, 2015).

Menurut Ayuningtyas (2021:1-2), Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) merupakan kerangka acuan untuk menciptakan akuntansi pemerintahan. Laporan keuangan pemerintah terdiri dari Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) dan

Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD). Hal ini didasarkan pada PP RI No 71 Tahun 2010 yang termasuk dalam PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan. Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan menggunakan akuntansi akrual untuk menyusun dan menyajikan neraca, laporan investasi, dan laporan perubahan ekuitas pemegang saham.

Bagi lembaga pemerintah seperti Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, perbekalan merupakan faktor penting dalam mendukung terselenggaranya kegiatan operasional yang berkaitan dengan pemberian pelayanan kepada daerah. Persediaan didefinisikan dalam kaitannya dengan aset yang dimiliki untuk dijual dalam rangka bisnis yang diproduksi untuk dijual, bahan atau pasokan untuk konsumsi dalam penyediaan proses atau jasa manufaktur (IAS:19-21). Tanpa pasokan, instansi pemerintah kesulitan melayani daerah padat penduduk dan pemerintah daerah. Jika terjadi kekurangan pasokan, operasi agensi akan dihentikan karena juga termasuk sebagai produk untuk mendukung kegiatan administrasi agensi.

Di Indonesia, pengertian persediaan juga mencakup peralatan yang digunakan dalam proses manufaktur. Hal ini dijelaskan dalam PSAP 05 tentang Akuntansi Persediaan sebagai berikut:

1. Barang atau perlengkapan yang digunakan sehubungan dengan operasi pemerintah.
2. Bahan atau peralatan yang digunakan dalam proses pembuatan.
3. Produk dalam produksi untuk dijual atau dipasok ke masyarakat umum.
4. Barang-barang yang dimiliki untuk penjualan atau penyediaan umum sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah berdasarkan pengertian tersebut

Menurut PSAP 05, Persediaan pemerintah meliputi:

1. Barang-barang yang dibeli dan disimpan untuk persediaan (*inventory*), seperti Alat Tulis Kantor (ATK), bahanhabis pakai seperti lampu, dan bahan habis pakai lainnya, seperti bahan pembersih.
2. Barang-barang yang digunakan dalam proses manufaktur.
3. Barang-barang yang dimiliki untuk dijual atau dipasok umum sehubungan dengan kegiatan-kegiatan pemerintah. Contoh: Kartu parkir.
4. Barang disimpan untuk tujuan penyimpanan strategis seperti penyimpanan energi atau untuk tujuan pencegahan seperti penyimpanan makanan.

Sistem persediaan yang baik dan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik. Persediaan lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum jika penyusunan laporan keuangan dilakukan secara transparan dan akuntabel, khususnya di bidang persediaan instansi pemerintah. Pemangku kepentingan sektor publik menyadari pentingnya dari beberapa perspektif. Oleh karena itu, manajemen persediaan yang tepat diperlukan untuk mengelola persediaan sedemikian rupa sehingga menghindari kegagalan sistem dalam operasi pemerintah.

Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 234/PMK.05/2020 Standar Akuntansi Pemerintahan Pusat mengharuskan persediaan dinilai menggunakan metode FIFO (*First In First Out*). Metode FIFO didasarkan pada asumsi bahwa harga pembelian persediaan dibebankan ke harga pokok penjualan berdasarkan pesanan. Metode FIFO juga mengasumsikan bahwa biaya persediaan diakui sebagai pendapatan sesuai

urutan terjadinya.

Aplikasi Persediaan adalah sistem aplikasi yang diperuntukkan bagi unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan tujuan memberikan kemudahan pengelolaan stock barang persediaan untuk keperluan operasional kantor. Di dalam aplikasi tersebut tersedia beberapa menu transaksi yang bisa digunakan untuk menginput data persediaan yang berada di Kementerian Kesehatan contohnya seperti transaksi persediaan masuk, persediaan keluar, koreksi, hasil opname fisik dan penghapusan using/rusak.

Berdasarkan pemaparan dan kasus tersebut saya sangat tertarik untuk mengetahui prosedur pencatatan pada akuntansi persediaan. Sehingga, saya menyusun laporan tugas akhir ini dengan judul **“Tinjauan Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintahan (PSAP) Nomor 05 Tentang Akuntansi Persediaan Pada Satuan Kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan RI”**

1.2 Permasalahan

1.2.1 Pokok Permasalahan

Beberapa pokok permasalahan yang akan dibahas dalam laporan ini yaitu:

1. Bagaimana prosedur pengelolaan barang persediaan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?
2. Bagaimana klasifikasi, pengakuan, pengukuran, beban dan pengungkapan dalam penerapan PSAP 05 pada satuan kerja di

Kementerian Kesehatan Republik Indonesia?

3. Bagaimana cara pencatatan transaksi pada penggunaan Aplikasi Persediaan?

1.2.2 Pembahasan Permasalahan

Penerapan prosedur terkait proses pengelolaan, klasifikasi, pengakuan, pengukuran, beban, pengungkapan dalam penerapan PSAP 05 dan petunjuk teknis penggunaan menu transaksi aplikasi persediaan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia

1.3 Tujuan dan Manfaat Penulisan

1.3.1 Tujuan Penulisan

Berdasarkan rumusan masalah, tujuan dari penulisan tugas akhir:

1. Untuk mengetahui prosedur pengelolaan barang persediaan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
2. Untuk mengetahui klasifikasi, pengakuan, pengukuran, beban dan pengungkapan dalam penerapan PSAP 05 pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.
3. Untuk mengetahui petunjuk penggunaan menu transaksi Aplikasi Persediaan pada satuan kerja Direktorat Jenderal Kefarmasian dan Alat Kesehatan di Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

1.3.2 Manfaat Penulisan

Adapun manfaat dari penulisan laporan tugas akhir meliputi :

1. Bagi Mahasiswa :

Laporan tugas akhir menjadi sarana untuk menambah pengetahuan serta wawasan mengenai prosedur persediaan di instansi pemerintah serta meningkatkan softskill dalam menyusun laporan dan kemampuan berfikir kritis mahasiswa.

2. Bagi Universitas :

Hasil penulisan laporan tugas akhir sarana untuk mengetahui tingkat pemahaman teori mahasiswa, mendapatkan informasi mengenai prosedur persediaan di instansi pemerintahan dan referensi bagi mahasiswa lain dalam menyusun laporan dengan topik sama, sehingga dapat dibahas lebih lanjut.

3. Bagi Instansi :

Hasil penulisan laporan diharapkan dapat membantu memberikan saran atas kekurangan dari penerapan prosedur persediaan di instansi, sebagai masukan pengambilan keputusan terkait prosedur serta membantu meningkatkan kinerja dimasa mendatang.

1.4 Metode Penulisan

Adapun metode penulisan yang digunakan untuk memperoleh data dalam menyusun laporan tugas akhir, meliputi:

1. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk memperoleh landasan penulisan laporan

dengan mencari teori dasar persediaan (berasal dari berbagai sumber buku serta jurnal penelitian) dan kebijakan prosedur persediaan (bersumber dari peraturan pemerintah dan ketentuan akuntansi yang berlaku umum).

2. Wawancara :

Metode ini dilakukan dengan mengajukan pertanyaan kepada pejabat pengelola persediaan untuk memperoleh informasi mengenai kebijakan yang diterapkan pada instansi.

3. Observasi :

Observasi dilakukan dengan pengamatan secara langsung terhadap setiap proses yang terjadi pada persediaan serta dokumen terkait. baik proses perencanaan serta penganggaran, klasifikasi, pengukuran, dan pengungkapan dalam penerapan akuntansi persediaan pada Kementerian Kesehatan Republik Indonesia.

4. Praktik Kerja

Metode ini dilakukan untuk mendapatkan informasi dan pemahaman atas penerapan prosedur persediaan dengan melakukan praktik kerja selama 3 bulan diKementerian Kesehatan RI.

DAFTAR PUSTAKA

- Arnaboldi, Lapsey and Steccolini, (2015). Local government administration systems and local government accounting information needs: is there a mismatch?. *International Review of Administrative Sciences Vol. 0(0), 1-18, 2018.*
- Bpsdm.pu.go.id, (2019). Pedoman Pengelolaan, Penatausahaan dan Akuntansi Persediaan.
- Hasanah, dan Fauzi. (2017). Akuntansi Pemerintahan. Bogor: INMEDIA
- Ikatan Akuntansi Indonesia (2018). Standar Akuntansi Keuangan. Jakarta: IAI
- Joglobang, (2020). Kebijakan Akuntansi Persediaan.
- Kartikahadi. (2017). *Akuntansi Keuangan Berdasarkan SAK Berbasis IFRS Buku 1.* Jakarta: Salemba Empat
- Khalid, (2018). An Analysis Of Optimal Inventory Accounting Models-Pros and Cons. *European Centre for Research Training and Development UK, Vol.6 (3), 65-77, 2018.*
- Kieso, Kimmel, Weygandt, (2019). Analysis Of The Application Of Recording Methods and Assessment Of Inventories In Accordance With PSAK No. 14 At Andrew Smith Urban Lifestyle Supermall Karawaci. *International Journal Of Science Technology & Management, Vol.2 (4), 1399-1409, 2021*
- Manohar, (2017). Accounting For Climate- Related Matters Into Financial Reporting. *Climate Disclosure Standards Board (CDSB), 2021.*
- Mulyadi. (2017). *Sistem Akuntansi.* Jakarta : Salemba Empat
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 Lampiran I Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrua Pernyataan Nomor 5 tentang Akuntansi Persediaan.
- Pemerintah Indonesia, (2020). Permenkeu No. 234/PMK.05/2020 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Pusat Bab VI mengenai Kebijakan Akuntansi Persediaan. Sekretariat Negara. Jakarta

Pamungkas, (2017). Pengaruh Penerapan Akuntansi Sektor Publik dan Pengawasan Terhadap Kualitas Laporan Keuangan dan Implikasinya Terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Steven, (2021). Effective Inventory Management Practice And Firms Performance: Evidence From Nigerian Consumable Goods Firms. *American International Journal of Business Management*, Vol.4 (5), 65-76, 2021.

Tim Penyusun, (2008). *Buku Pedoman Laporan Tugas Akhir Program Diploma Tiga (D-3)*. Jakarta. Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA.

